

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penerapan kebijakan berpakaian perempuan pada tahun 1973 merupakan hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan, mencerminkan dinamika sosial pada masa tersebut. Secara internal, Konfusianisme sebagai sistem nilai tradisional yang sudah lama berakar dalam masyarakat Korea Selatan, memainkan peran penting dalam membentuk pandangan tentang aturan kehidupan. perempuan dianggap sebagai simbol moralitas keluarga dan masyarakat, sehingga norma berpakaian yang sopan dipandang sebagai cara untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut. Pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Park Chung Hee memanfaatkan nilai-nilai Konfusianisme ini untuk memperkuat stabilitas sosial. Sementara itu, faktor eksternal juga memberikan tekanan besar pada kebijakan tersebut. Globalisasi yang mulai berkembang pesat pada dekade 1970-an membawa masuk budaya Barat ke berbagai negara, termasuk Korea Selatan. Dalam upaya untuk melawan perubahan ini, pemerintah menggunakan kebijakan berpakaian sebagai cara untuk mempertahankan identitas budaya lokal dan memperkuat nilai-nilai tradisional.

Kebijakan berpakaian perempuan yang sangat dipengaruhi oleh Konfusianisme, akhirnya menjadi simbol dari konflik antara mempertahankan tradisi dan menerima perubahan yang lebih progresif. Hukuman yang diberlakukan akibat pelanggaran kebijakan ini, seperti denda, peringatan atau bahkan penahanan, mencerminkan betapa ketatnya kontrol sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Konflik muncul antara perempuan yang ingin mengekspresikan diri dengan cara yang lebih bebas dan etika yang dipaksakan oleh pemerintah serta masyarakat yang berlandaskan ajaran

Konfusianisme. Respon masyarakat terhadap perubahan ini terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu, masyarakat konservatif dan masyarakat progresif. Kelompok konservatif, yang sangat menjunjung nilai-nilai tradisional Konfusianisme, menganggap kebijakan berpakaian yang diterapkan pemerintah sebagai langkah yang diperlukan untuk mempertahankan moralitas dan tatanan sosial. Sebaliknya, kelompok progresif, khususnya di kalangan generasi muda, melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk pengekan terhadap kebebasan individu.

4.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis ajukan untuk penelitian selanjutnya dapat fokus pada kebijakan pemerintah Park Chung Hee pada tahun 1973 yang menuai kontroversi lainnya, seperti panjang rambut laki-laki dan pembatasan terkait kegiatan bermusik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif serta melakukan wawancara atau menyebarkan kuesioner guna menggali pandangan masyarakat Korea mengenai kebijakan tersebut.

Dengan demikian, penelitian yang lebih mendalam dan variatif dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dampak sosial dan budaya dari kebijakan pemerintah pada masa itu.